

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik dalam sistem demokrasi yang bertujuan membentuk kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi politik yang rasional dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik berkewajiban menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat luas. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi politik masyarakat, citra negatif partai politik, serta kecenderungan partisipasi politik yang masih bersifat pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi partai politik dalam pendidikan politik. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan pengurus Partai Demokrat dan masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan, antara lain pelatihan dan kaderisasi politik, diskusi publik dan seminar politik, penyuluhan politik kepada masyarakat, kampanye anti politik uang, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia kader, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi organisasi. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya minat masyarakat terhadap kegiatan politik, dominasi pengaruh tokoh dalam preferensi politik masyarakat, serta citra negatif partai politik di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal partai serta strategi pendidikan politik yang lebih adaptif dan berkelanjutan agar fungsi pendidikan politik dapat berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Kata kunci: Partai Demokrat, Pendidikan Politik, Partai Politik